



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANTON PRIHASAN
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 679892

**II. DATA HARTA**

|                                                                                             |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                | <b>Rp.</b> | <b>3.200.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 529 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , Rp. 3.200.000.000 |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                       | <b>Rp.</b> | <b>118.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000                             |            |                      |
| 2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000                              |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                            | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                | <b>Rp.</b> | <b>5.501</b>         |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                     | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>                                                                            | <b>Rp.</b> | <b>3.318.005.501</b> |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                          | <b>Rp.</b> | <b>1.560.868.208</b> |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                                    | <b>Rp.</b> | <b>1.757.137.293</b> |

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PUTRI SAKINAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 919938

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                      |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                         | <b>Rp.</b> | <b>1.231.585.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.231.585.000 |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                                | <b>Rp.</b> | <b>400.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000                                    |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                     | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                             | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                         | <b>Rp.</b> | <b>30.000.000</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                              | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>                                                                                     | <b>Rp.</b> | <b>1.661.585.000</b> |

**III. HUTANG** **Rp.** **1.442.512.417**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **219.072.583**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARI UTOMO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3. NHK : 227116

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                                 |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>2.180.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000 |            |                      |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000                    |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                                           | <b>Rp.</b> | <b>5.000.000</b>     |
| 1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000                                                  |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                                | <b>Rp.</b> | <b>110.000.000</b>   |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>72.000.000</b>    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                                         | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                | <b>Rp.</b> | <b>2.367.000.000</b> |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                                              | <b>Rp.</b> | <b>50.000.000</b>    |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>2.317.000.000</b> |

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUDARSONO
2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. NHK : 1000036

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.750.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 372.750.000

**III. HUTANG** Rp. 44.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 328.750.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SARAH SUHALYA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 198066

**II. DATA HARTA**

|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                            | Rp. | ----        |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                   | Rp. | 100.000.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI |     |             |
| Rp. 100.000.000                                         |     |             |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                        | Rp. | 22.000.000  |
| <b>D. SURAT BERTHARGA</b>                               | Rp. | ----        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                            | Rp. | 10.000.000  |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                 | Rp. | ----        |
| Sub Total                                               | Rp. | 132.000.000 |
| <b>III. HUTANG</b>                                      | Rp. | 230.000.000 |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                | Rp. | -98.000.000 |

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD SOLEH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 1000363

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                                |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                                   | <b>Rp.</b> | <b>330.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA<br>JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000 |            |                    |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                                          | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                               | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                                       | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                                   | <b>Rp.</b> | <b>500.000</b>     |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| Sub Total                                                                                                      | <b>Rp.</b> | <b>330.500.000</b> |

**III. HUTANG** **Rp.** **915.825.054**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **-585.325.054**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.